

# **BAB I**

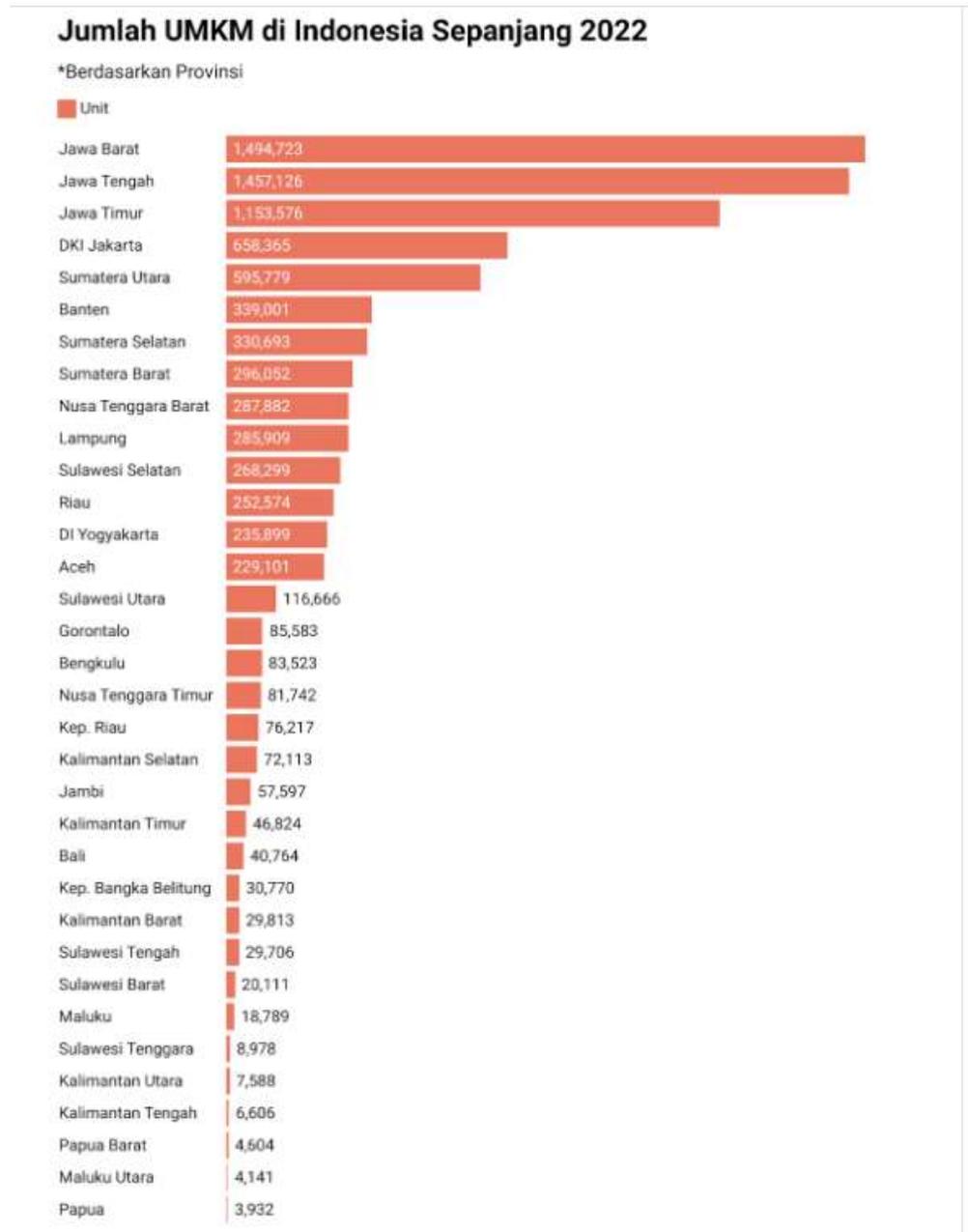
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

UMKM di Indonesia memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian nasional. Sesuai UU No. 28 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha-usaha ini berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dan penyediaan layanan ekonomi yang lebih luas terhadap masyarakat. Tujuan utama dari UMKM adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. UMKM di Indonesia sudah memperlihatkan ketahanannya untuk menghadapi persaingan di pasar global yang makin dinamis. Bisnis-bisnis ini umumnya didirikan oleh individu atau kelompok menengah yang membutuhkan modal kecil dan tidak tergantung pada teknologi canggih dalam proses produksinya. Sebaliknya, mereka mengandalkan semangat kewirausahaan, keinginan untuk berkembang, dan ketekunan yang tinggi. Biasanya, usaha ini dimiliki atau didirikan oleh individu atau keluarga (dikenal sebagai usaha keluarga). UMKM di Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis barang di berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fashion, perabot rumah tangga, serta jasa.

UMKM di Indonesia terus memperlihatkan pertumbuhan yang besar tiap tahunnya. Di tahun 2021, pemerintah merilis platform *Online Single*

*Submission – Risk Based Approach (OSS RBA)*, yang dapat diakses melalui situs web [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Platform tersebut memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin perusahaan mereka. Pada tahun 2022, diperkirakan sebanyak 8,71 juta unit UMKM telah resmi terdaftar di platform OSS. Distribusi dari perusahaan-perusahaan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Jumlah UMKM yang Sudah Terdata di OSS

Sumber : <https://ukmindonesia.id/>(2024)

Mendapatkan modal pinjaman masih dianggap sulit karena pemberi pinjaman cenderung berhati-hati. Kreditur menginginkan data yang komprehensif mengenai kondisi UMKM sebelum memberikan pinjaman,

meskipun banyak badan usaha yang gagal atau tidak mampu menyediakan informasi pendukung yang memadai, seperti data akuntansi (Baas & Sochrooten, 2016). Beberapa UMKM tidak mampu menyediakan informasi akuntansi karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pelaporan keuangan bagi perusahaan mereka. Pada dasarnya, UMKM tersebut belum menyadari pentingnya akuntansi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pentingnya mencatat dengan teliti aktivitas akuntansi UMKM telah ditekankan secara kuat. Ari Nuvitasari menyoroti pada tahun 2019 bahwa sebagian besar pelaku UMKM enggan untuk mendokumentasikan transaksi keuangan mereka dengan bukti yang kuat. Kondisi ini berpotensi mempersulit mereka dalam mengukur pendapatan dan keuntungan secara tepat, sesuai dengan standar yang berlaku. Kesulitan semacam ini bisa menjadi hambatan bagi mereka dalam mendapatkan dukungan finansial dari lembaga-lembaga keuangan.

Secara praktis, proses pembuatan laporan keuangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku usaha memiliki anggapan bahwasanya pembuatan laporan keuangan itu sulit, rumit, dan membutuhkan kepatuhan terhadap banyak peraturan. Pandangan ini menciptakan hambatan dan mungkin membuat individu enggan untuk mendokumentasikan laporan keuangan mereka, sehingga menghalangi kemampuan mereka untuk menentukan pendapatan riil secara akurat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan, panduan, dan pengawasan

agar penyusunan laporan keuangan sejalan atas standar serta selaras dengan keuntungan dan tujuan yang diharapkan.

Setiap perusahaan harus menyediakan laporan keuangan dan dokumen pendukung yang menjelaskan kinerja keuangan dan memberikan informasi yang tepat tentang status keuangannya. Laporan yang efektif harus memenuhi kriteria yang relevan dan sesuai dengan karakteristik spesifik perusahaan. Laporan keuangan mengacu pada perolehan akhir dari proses akuntansi, disusun menggunakan sistem akuntansi yang berlaku, dan disajikan sebagai informasi yang dapat dicatat dan diverifikasi akurasi, yang merupakan kebutuhan bagi UMKM. Agar pelaku UMKM dapat memperoleh modal pinjaman atau pendanaan dari kreditur, mereka harus mendokumentasikan setiap transaksi dengan cermat dan menyediakan laporan keuangan yang komprehensif. Tanggung jawab ini berada pada pelaku UMKM itu sendiri.

Penting bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya membuat laporan keuangan dan memiliki keahlian di bidang akuntansi. Mereka menghadapi tantangan karena keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pencatatan. Untuk memastikan penyusunan laporan keuangan UMKM yang tepat, perlu adanya pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan oleh para ahli. Untuk membantu pelaku UMKM yang kesulitan membuat laporan keuangan, penting untuk menetapkan aturan akuntansi yang jelas dan mudah dipahami. Pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) memperkenalkan standar

baru yang disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini dirancang untuk membantu pemilik UMKM dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan mereka. Standar ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. IAI, sebagai badan akuntansi profesional, menerbitkan standar baru ini untuk menghasilkan peningkatan dan penegakan transparansi serta akuntabilitas pada laporan keuangan entitas, guna mendukung pengembangan UMKM secara holistik di Indonesia.

DSAK IAI juga merilis SAK ETAP pada tahun 2009 yang berlaku untuk UMKM. Meskipun demikian, meningkatnya permintaan akan pedoman akuntansi yang lebih jelas dipicu oleh kurangnya tenaga kerja yang tersedia. SAK EMKM dirancang sebagai suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Fokusnya lebih pada transaksi yang terjadi di dalam lingkup UMKM secara menyeluruh. Menurut IAI (2016), SAK EMKM terdiri dari tiga komponen laporan keuangan: neraca, laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan (CALK), sedangkan SAK ETAP mencakup lima komponen laporan keuangan. SAK EMKM dianggap sebagai standar akuntansi yang lebih mudah karena itu. Selain itu, pengukurannya hanya berdasarkan prinsip historis biaya, yang berarti UMKM hanya perlu melaporkan nilai aset dan liabilitas berdasarkan biaya awal. Laporan keuangan berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi keuangan dan harus memenuhi persyaratan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa

informasi yang diberikan dapat dianggap akurat dan berguna bagi pemangku kepentingan atau pemegang saham yang memerlukan informasi tersebut. Pemilik juga mungkin menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan. Diharapkan keberadaan SAK EMKM akan mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan mereka dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Peraturan Pajak Nomor 46 Tahun 2013 menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 1% bagi UMKM dengan omzet tahunan kurang dari 4,8 miliar. Dengan mematuhi persyaratan ini, operator perusahaan UMKM dapat secara efektif menyusun laporan yang memenuhi standar yang relevan, sehingga memungkinkan mereka mengoptimalkan keuntungan yang diinginkan dan menghindari pajak atas pendapatan UMKM (Warsono, 2020).

Di kabupaten Jombang banyak tersebar UMKM menurut data BPS Jombang sejak 2022 hingga Oktober 2023 ini, sudah ada 32 UMKM di Jombang etalase yang terdaftar di e-katalog. Dari jumlah itu, sudah ada 27.883 produk tayang baik pengadaan barang maupun jasa. Pemkab Jombang berhasil menempati urutan produk tayang peringkat tiga tingkat nasional maupun provinsi dari 38 kabupaten/kota di Jatim (<https://radarjombang.jawapos.com/>)

Ada pun objek penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti salah satunya yakni unit usaha UMKM pembuatan Manik-manik yang memiliki lokasi di desa Plumbon Gambang. desa yang sekitar km dari pusat kota

Jombang ini ialah sentra penghasil manik-manik terbesar di dunia. Apabila kita berkunjung ke desa ini, kita akan melihat toko-toko yang menjual manik-manik yang lokasinya berdampingan antar toko satu dengan yang lain. Keunggulan utama desa ini menarik minat orang untuk berkunjung. Ahli penelitian memfokuskan perhatian pada UMKM karena sering kali perusahaan-perusahaan ini melakukan pembelian bahan baku, membuat pesanan dalam jumlah besar, dan mengumpulkan uang muka pembelian kain dari pelanggan. Semua kegiatan ini terhubung langsung dengan operasi perusahaan dan proses produksi. Kurangnya pengelolaan yang tepat dan akurat terhadap transaksi-transaksi ini dapat menyebabkan pemilik kesulitan dalam menentukan dengan tepat jumlah omset, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial. Pengelolaan keuangan yang efisien memerlukan penyusunan laporan keuangan yang teliti, yang berguna untuk memantau pendapatan, pengeluaran, biaya produksi, dan hasil keuntungan. Laporan-laporan ini dapat memberikan wawasan kepada pemilik untuk mengurangi pengeluaran secara efektif. Pelaku UMKM perlu mengenali pentingnya akuntansi dalam organisasi mereka, dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Akuntansi memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan UMKM, khususnya dalam menangani isu keuangan. Melalui praktik akuntansi yang tepat, UMKM dapat merencanakan strategis untuk meningkatkan profitabilitasnya. Dengan pertumbuhan yang semakin tinggi, kontribusi UMKM terhadap pemecahan tantangan ekonomi di Indonesia

akan semakin signifikan. Namun, kendala muncul karena sebagian besar UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan secara akurat dan efisien. Keterbatasan informasi dan sumber daya menjadi penghalang utama dalam perencanaan, penciptaan, dan pelaporan keuangan. Banyak UMKM enggan menerapkan akuntansi karena dianggap rumit dan tidak begitu penting. Sebagian pelaku UMKM bahkan berpendapat bahwa organisasi mereka dapat beroperasi dengan efisiensi dan mencapai keuntungan yang stabil tanpa perlu menerapkan praktik akuntansi.

Penelitian Mustarini (2023) dengan judul “Implementasi pemahaman dan kesiapan SAK EMKM pada UMKM Giri Sembada”. Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya pelaku UMKM di Girikerto mempunyai pemahaman yang kuat terkait prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku bagi perusahaan mikro dan kecil. Tingkat pemahaman tentang akuntansi dasar mencapai sekitar 70,7% dan 81,8% secara berturut-turut. Namun, pemahaman terkait SAK EMKM, khususnya di antara pelaku usaha mikro dan kecil, berbeda-beda dan cukup rendah, dengan tingkat kekurangan pemahaman mencapai 54,2% dan 68,75% secara berturut-turut. Meskipun demikian, pelaku UMKM menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi dalam mengadopsi pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, dengan sebagian besar entitas bisnis menyatakan kesiapan mereka untuk mengadopsi standar tersebut, bergantung pada pemahaman yang kuat tentang SAK EMKM. Tingkat kesiapan untuk usaha mikro mencapai 65,1%, sementara untuk usaha kecil mencapai 57,1%. Namun,

beberapa pelaku usaha mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk menerapkan SAK EMKM di perusahaan mereka. Penelitian Umami (2022) dengan judul “Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Super Sedap di Kabupaten Sukabumi” hasilnya pencatatan laporan keuangan pada UMKM Super Sedap mengungkapkan bahwa penerapan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM menyebabkan perbedaan laba bersih yang signifikan sebelum dan sesudahnya. Tantangan utama dalam penerapan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM untuk UMKM Super Sedap sebagian besar terkait dengan kurangnya detail yang komprehensif dalam penggunaan seluruh aset yang dimiliki.

Sesuai uraian permasalahan yang sudah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian dengan objek UMKM Manik-manik Jombang, dan menjadikannya sebagai bentuk skripsi berjudul “ Analisis Kesiapan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM Pada UMKM Manik-Manik Jombang ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Manik-Manik Jombang Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Manik-Manik Jombang Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada para peneliti tentang penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM.
- b. Bisa menjadi referensi yang dapat dipercaya dan sumber pengetahuan berharga bagi para mahasiswa di masa mendatang.
- c. Data yang dihasilkan dapat menjadi pedoman penting untuk pengambilan keputusan yang tepat demi mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Informasi dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam mendukung diskusi terkait pengembangan laporan keuangan UMKM sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi UMKM Manik-manik Jombang dengan memberikan panduan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM.